

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Guru merupakan salah satu faktor penting bagi keberhasilan pembangunan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan di masa depan. Sudjana menyebutkan guru memiliki kedudukan sentral karena perannya sangat menentukan dalam proses pembelajaran.¹ Proses pendidikan melibatkan berbagai unsur antara lain: kurikulum, sarana prasarana, penilaian dan lain-lain, guru tetap memiliki peran strategis dalam menggerakkan semua unsur. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat, guru ketinggalan dengan laju perkembangan, tidak bisa memberikan pembelajaran dengan baik, bahkan dapat tertinggal dari muridnya.

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal informasi tanpa dituntut memahami informasi yang diingatnya itu untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari.²

Suatu kenyataan yang dihadapi dunia pendidikan khususnya Pendidikan Agama Islam di lembaga pendidikan formal saat ini, adalah rendahnya kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa di dalam kelas.

¹ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 5

² Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, (Bandung: Kencana, 2006), hlm. 1

Permasalahannya adalah proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam kurang berhasil dalam pembentukan perilaku positif siswa. Lemahnya aspek metodologi yang dikuasai oleh guru juga merupakan penyebab rendahnya kualitas pembelajaran. Kompetensi guru baik kompetensi pedagogik, profesional, sosial maupun personal masih belum memadai. Hal ini dapat dilihat dan kurangnya kematangan emosional dan kemandirian berfikir. Metode yang banyak dipakai adalah model konvensional yang kurang menarik.³

Padahal setiap orang yang memiliki tanggung jawab mendidik disebut dengan pendidik. Tanggung jawab harus dimiliki oleh seorang pendidik, dan tanggung jawab dalam proses pendidikan akan terwujud apabila terjadi pergaulan antara pendidik dan peserta didik. Pergaulan tersebut menjadi suatu proses pendidikan, jika adanya kewibawaan suatu pendidik.⁴

Guru adalah garda depan dari sistem pendidikan. Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu maka harus dipastikan juga guru-guru yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran bagi siswa di sekolah, juga sudah bermutu. Terlepas dari atmosfer politik yang tidak begitu menguntungkan bagi guru, secara jujur juga harus diakui, guru masih belum mampu tampil optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesinya. Kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial yang harus dimiliki oleh guru sebagai agen pembelajaran sebagaimana diamanatkan PP Nomor 19/2005 tentang Standar

³ Tafsir, A, *Berbagai Permasalahan Dalam Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Gunung Jati, 1997), hlm. 14

⁴ Rusmaini, *Ilmu Pendidikan*, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2011), hlm. 97

Nasional Pendidikan (SNP), pasal 28 ayat 3 masih dipertanyakan banyak kalangan.⁵

Salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki guru adalah kemampuan dalam merencanakan dan melaksanakan proses belajar mengajar. Belajar dan mengajar memerlukan perencanaan yang seksama yakni mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan belajar mengajar, metode dan alat bantu mengajar serta penelitian evaluasi.

Guru memegang peran penting dalam proses pendidikan khususnya dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Intreraksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa itu merupakan syarat utama berlangsungnya proses belajar mengajar mempunyai arti yang lebih luas, tidak sekedar hubungan antar guru dan siswa, tetapi berupa interaksi edukatif yaitu bukan hanya penyampaian pesan berupa materi pelajaran saja, melainkan penanaman sikap dan nilai pada diri siswa yang sedang belajar.

Dari keempat kompetensi yang harus dimiliki guru, dua di antaranya dinilai masih menjadi problem serius dan krusial di kalangan guru terutama kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Dari aspek kompetensi pedagogik, guru dinilai belum mampu mengelola pembelajaran secara maksimal, persiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, maupun pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang

⁵ Saipul Segala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 61

dimilikinya. Dari aspek kompetensi profesional, banyak guru yang dianggap masih gagap dalam menguasai materi ajar secara luas dan mendalam sehingga gagal menyajikan kegiatan pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat bagi siswa.⁶

Permasalahan kompetensi pedagogik guru tidak hanya terlihat dari kemampuan mereka memilih dan melaksanakan metode dan strategi pembelajaran, tetapi lemahnya kompetensi pedagogik guru juga tercermin dari cara guru memperlakukan memberikan pelayanan kepada peserta didik. Anak dipukuli, direspons dengan kata-kata kasar, diomeli, omongannya tidak didengar, permasalahannya kurang diperdulikan, dan sebagainya. Kesemua itu adalah sebagian dari potret kekerasan guru terhadap peserta didik disekolah. Kekerasan dalam dunia pendidikan akan berlanjut apabila komponen pendidikan (peserta didik, guru, karyawan, dan kepala sekolah) belum menyadari hakikat pendidikan sebagai sebuah proses, yakni proses menggali potensi yang diberikan Tuhan kepada manusia sejak lahir, proses untuk bergaul dengan lingkungan yang berbeda, dan proses untuk bergaul dengan lingkungan yang berbeda. Kondisi tersebut merupakan satu indikasi tidak dipraktikkannya ilmu pendidikan pedagogik dan merajalelanya kecelakaan pendidikan.⁷

Contoh studi kasus dalam kompetensi pedagogik seperti yang di kutip dalam buku Rifma dalam bukunya optimalisasi kompetensi pedagogik guru disana dikatakan bahwa ditemui di SDN C yang tidak disebutkan SD berapanya

⁶ Yamin, M, *Sertifikasi profesi keguruan di Indonesia.*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2006), hlm. 153

⁷ Rifma, *Optimalisasi Pembinaan Kompetensi Pedagogik Guru.*, (Padang: PRENADA MEDIA GROUP, 2016, hlm.3

dimana pada saat observasi yang dilakukan disekolah tersebut pada tanggal 8 maret 2011. Semua guru kelas diobservasi oleh kepala sekolah dan sekolah lain. Penulis buku mengobservasikan kelas I dan IV. Meskipun sedang diobservasi oleh kepala sekolah namun ia juga memedomani RPP. Ia mempunyai RPP tematik yang sudah dicetak, tetapi pembelajarannya masih belum tematik. Supervisor yang mengamatinya pun menyebutkan bahwa “RPP guru kelas I tematik, tapi cara mengajarnya tidak tematik. Ibu guru kelas I itupun menjawab bahwa ia memiliki RPP tapi RPP dia beli yang sudah jadi. Menurut informan tersebut ia bisa membuat RPP tapi membuat RPP tematik belum bisa. Selain tidak mampu membuat RPP ia juga tidak mempunyai waktu untuk membuat RPP.

Berdasarkan paparan data yang diuraikan di atas dapat dikemukakan bahwa kompetensi guru merencanakan pembelajaran masih jauh dari harapan. Dari ungkapan dan perilaku guru saat menyampaikan data diperoleh kesan bahwa sepertinya guru beranggapan merencanakan pembelajaran itu bukan hal yang penting dalam melaksanakan tugas mengajar. Tanpa perencanaan pun pembelajaran menurut mereka masih bisa dilaksanakan. Mengajar tanpa RPP tidak menjadi beban bagi guru kondisi ini merupakan problema sekaligus tantangan bagi kepala sekolah dan pengawas selaku pembina kompetensi guru di sekolah.

Proses pembelajaran yang efektif dan efisien dapat terwujud melalui usaha optimal dari guru. Guru perlu melakukan proses pembelajaran dengan baik, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan tindak lanjut hasil proses pembelajaran. Namun dalam kenyataannya tahapan proses pembelajaran

tersebut masih banyak menemui masalah. Silabus dan rpp yang dimiliki guru pada umumnya disusun bersama dari lembaga lain atau *copy file* tanpa adanya modifikasi dan revisi dalam rangka menyesuaikan dengan peserta didik dan kondisi sekolah masing-masing. Bahkan sebagian guru menyusun RPP hanya untuk memenuhi kebutuhan administratif (bahan naik pangkat dan bahan usulan sertifikasi profesi guru) bukan untuk pedoman sebagai proses pembelajaran.⁸

Senada dengan Jejen Musfah⁹ menjelaskan kompetensi pedagogik adalah kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi: (a) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, (b) pemahaman tentang peserta didik, (c) pengembangan silabus atau kurikulum, (d) perancangan pembelajaran, (e) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, (f) evaluasi hasil belajar, guru diharapkan mampu terampil untuk mengelola pembelajaran peserta didik sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.

Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik termasuk dalam salah satu komponen kemampuan pedagogik guru. Apabila guru mampu mengelola pembelajaran dengan tepat, maka kemampuan pedagogik pada aspek tersebut telah terpenuhi. Kemampuan dibutuhkan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran berkualitas maka peluang untuk mendapatkan hasil belajar yang berkualitas tinggi, sehingga kemampuan pedagogik penting dimiliki guru dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

⁸ *Ibid.*, hlm. 4

⁹ Musfah, J, *Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 31

Dengan melihat keadaan guru di lapangan yang sangat bervariasi dilihat dari latar belakang pendidikan, pangkat dan golongan, masa kerja, pengalaman mengajar, serta keadaan wilayah, keberadaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kualitas mata pelajaran. Terutama untuk menyamakan persepsi, substansi materi, pemilihan metode, serta penentuan pola evaluasi yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan kondisi yang ada.

Sebenarnya sudah banyak upaya pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan baik yang menyangkut proses pembelajaran maupun pengembangan kurikulum. Upaya yang dilakukan mulai dari menyelenggarakan pelatihan dalam bentuk *in-house training*, *in-service training*, lokakarya, seminar penataran dan sebagainya. Tetapi nampaknya upaya ini belum memperoleh hasil yang optimal. Ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa program pemerintah dalam meningkatkan usaha kualitas guru dalam mencapai sasaran, diantaranya adalah program yang dikembangkan kurang melibatkan guru, permasalahan yang disajikan bersifat generalisasi yang berlaku umum padahal permasalahan yang dihadapi guru seringkali bersifat lokal dan kontekstual, permasalahan yang dianggap penting oleh pengembang program belum tentu dianggap sebagai permasalahan yang penting oleh guru. Program yang dikembangkan seringkali memisahkan antara aspek materi dengan aspek pedagogik, inovasi yang

disampaikan dalam program seringkali disampaikan dengan dijelaskan bukan dicontohkan.¹⁰

Dari hal-hal yang dikemukakan di atas dapat diartikan bahwa program-program pelatihan yang dikembangkan tidak memenuhi apa yang dibutuhkan oleh guru. Dan ketidakefektifan dari program pelatihan dalam mencapai sasaran salah satunya disebabkan karena apa yang diberikan dalam program-program tersebut tidak sesuai dengan apa yang diperlukan oleh guru.

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sebagai forum diskusi guru menjadi salah satu upaya meretas permasalahan pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Kenyataan di lapangan, beberapa Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam Sekolah Menengah Pertama (SMP) kota Palembang masih banyak kelemahan, seperti kapabilitas narasumber, kreativitas pengurus, kehadiran anggota. Kelemahan-kelemahan tersebut menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan terbentuknya organisasi guru tersebut. Padahal esensi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sebagai wadah perkumpulan guru untuk saling belajar, diskusi, bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka peningkatan dan pengembangan keprofesian guru berkelanjutan.

Menurut Ibu Aliyah Rahmi, M.Pd.I selaku ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI SMP Kota Palembang sekaligus ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP PAI Sumatera Selatan wawancara pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 pukul 10.00 WIB ada banyak hal atau permasalahan guru terutama dalam proses pembelajaran seperti pelaksanaan kegiatan belajar

¹⁰ Jurnal Tarbiyah, *Efektivitas MGMP untuk meningkatkan kompetensi guru Bahasa Inggris di Kota Binjai*, (Sumatera Utara: Jurnal Tarbiyah, vol.24 Juli-Desember, 2017), hlm. 297

mengajar tidak sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran yang sudah disusun dalam silabus, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar masih terpusat pada guru dan belum terpusat pada siswa, guru masih aktif dalam menyampaikan materi, model pembelajaran yang digunakan tidak bervariasi, soal ulangan harian tidak dirumuskan sendiri oleh guru misalnya dengan menggunakan kisi-kisi soal tetapi langsung merujuk atau mengutip dari buku paket, dan masih ada juga guru PAI yang kurang berminat dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dengan mengikuti forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) adalah salah satu alternatif untuk mengatasi masalah tersebut. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam merupakan sarana yang tepat bagi guru untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi sekaligus mengembangkan profesi, saling berkomunikasi, konsultasi dan bertukar pengalaman sehingga menimbulkan kontribusi dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai ujung tombak terjadinya perubahan dan orientasi pembelajaran yang bermutu di Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Maka dari itu, untuk mengetahui secara objektif kontribusi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI SMP terhadap peningkatan kompetensi pedagogik guru PAI SMP Kota Palembang diperlukan penelitian yang seksama yang langsung melibatkan guru-guru tersebut. Dari latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk meneliti **“Peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam (PAI) SMP dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru Di Kota Palembang”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini fokus dan terarah, maka perlu adanya batasan masalah terutama pada konsep kompetensi. Dari kompetensi pedagogik yang di dalamnya terdapat banyak hal cakupannya maka peneliti hanya meneliti tentang: perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian pembelajaran.

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam penelitian ini dibatasi pada guru Pendidikan Agama Islam SMP pada Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Kota Palembang dalam meningkatkan kompetensi pedagogik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam SMP dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru di Kota Palembang?
 - a. Bagaimana peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam SMP dalam meningkatkan perencanaan pembelajaran guru di Kota Palembang?
 - b. Bagaimana peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam SMP dalam meningkatkan pelaksanaan pembelajaran guru di Kota Palembang?

- c. Bagaimana peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam SMP dalam meningkatkan evaluasi hasil belajar guru di Kota Palembang?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam perencanaan pembelajaran guru di Kota Palembang.
- b. Untuk menganalisis peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam pelaksanaan pembelajaran guru di Kota Palembang.
- c. Untuk menganalisis peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam evaluasi hasil pembelajaran guru di Kota Palembang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan penelitian secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk para guru, sebagai bahan masukan bagi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan terutama bagi pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) guru Pendidikan Agama Islam. Dan penelitian ini bisa menjadi informasi untuk melakukan penelitian sejenis.

- b. Kegunaan penelitian secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk guru, siswa dan siswi terutama di wilayah SMP Kota Palembang sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien dan tercapai tujuan pembelajaran.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah uraian tentang hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang direncanakan. Selain itu juga untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian.¹¹

Kajian pustaka yang dimaksud disini adalah mengkaji atau memeriksa daftar pustaka untuk mengetahui apakah permasalahan yang akan penulis teliti sudah ada mahasiswa yang meneliti dan membahasnya. Setelah ada pemeriksaan ternyata sudah ada mahasiswa yang membahas tema yang berkaitan dengan peneliti yang lakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Anwar dengan judul tesis “Hubungan Kinerja Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dengan Kompetensi Mengajar Guru Pendidikan Agama Islam pada SMP Negeri di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar’. Dasar pemikiran yang melatarbelakangi penelitian ini adalah upaya peningkatan kompetensi guru sangat penting dilakukan dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan pendidikan. Dengan melaksanakan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) maka diharapkan dapat

¹¹ Fakultas Tarbiyah, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah*, (Palembang: IAIN Press, 2012), hlm. 15

meningkatkan kompetensi guru yang pada akhirnya hasil belajar akan juga meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Hamzah dengan judul tesis “Efektivitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam SMP dalam meningkatkan kompetensi Guru di Kota Palopo” dengan hasil penelitian bahwasannya MGMP di kota Palopo cukup eksis dalam melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi guru PAI, kompetensi guru PAI di Kota Palopo cukup baik dalam melakukan persiapan pembelajaran dikelas, usaha-usaha yang dilakukan dalam meningkatkan kompetensi guru dikota Palopo adalah melakukan pertemuan minimal sekali dalam satu semester, menghadirkan nara sumber atau pembimbing dalam pertemuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), membahas materi-materi yang sangat esensial.

Manda Saragih dengan judul tesis “ Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) adalah wadah untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Dalam penelitian evaluatif ini ditemukan bahwa ada hubungan langsung yang signifikan antara reaksi peserta terhadap implementasi program Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki peserta setelah mengikuti program tersebut, dan reaksi positif peserta terhadap implementasi program Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) secara signifikan mempengaruhi tingkat penguasaan pengetahuan dan keterampilan peserta.

Arifin dengan judul tesis “Peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) pendidikan kewarganegaraan kota Malang dalam meningkatkan

kompetensi profesional guru. Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara interaktif. Penelitian ini dilakukan di Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kota Malang. Sumber data terdiri Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Anggota Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan Dinas Pendidikan Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kota Malang dalam meningkatkan kompetensi profesional guru (perannya sebagai reformator, mediator, Supporting Agency, kolaborator, evaluator, Clinical and Akademik Supervisor) diakui oleh anggota (guru) dapat memberikan pengetahuan, sebagai tempat memperoleh informasi kependidikan, 2) Faktor yang mempengaruhi peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kota Malang dalam meningkatkan kompetensi profesional guru adalah kesadaran guru untuk aktif mengikuti kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) masih kurang, manajemen Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) kurang berfungsi secara optimum, dana pendukung untuk menunjang kegiatan kurang proposional, pemerintah daerah kurang peduli terhadap berbagai inisiatif yang dilakukan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), tidak sedikit guru yang masih punya prinsip *many oriented*, 3) upaya yang dilakukan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam meningkatkan kompetensi profesional guru adalah melakukan seminar sehari dalam meningkatkan kompetensi profesional guru dengan mengundang narasumber yang kompeten, mengefektifkan peran yang di

emban Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) karena upaya untuk meningkatkan kompetensi profesional guru sudah di tuangkan dalam bentuk peran yang di emban Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang di realisasikan dalam bentuk seminar, work shop, penyusunan LKS, penulisan buku ajar, perlu optimalisasi dukungan dari semua stakeholder, optimalisasi dukungan K3S (kelompok kerja kepala sekolah).

Tesis Muhammad Sukron dengan judul : Peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) bagi pengembangan kompetensi profesional Guru PAI SMA/SMK Sekota Salatiga Tahun 2016. Data penelitian ini menggunakan data induktif, pelaksanaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI SMA/SMK berjalan dengan baik dengan mengacu AD/ART dan program kerja yang disusun oleh pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dengan berbagai kendala yang dihadapi. Peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam mengembangkan kompetensi profesional guru PAI yaitu memilih mata motode pelajaran yang efektif dan efisien, menentukan metode evaluasi, menertibkan, mengadakan metode dan membuat perangkat pembelajaran, mengadakan pelatihan metode dan pembuatan perangkat pembelajaran, menyusun kisi-kisi soal, mengkaji buku PAI, mengadakan IHT, memecahkan masalah, serta menentukan cara bimbingan siswa. Peran supervisor dalam mengembangkan kompetensi profesional guru PAI adalah: (1) membimbing guru PAI dalam menyusun administrasi pembelajaran; (2) memotivasi untuk aktif mengikuti kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), mendalami materi, serta

meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran dan keterampilan di bidang IT.

Dari kelima tesis di atas yang penulis sebutkan, meskipun dibahas Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) tetapi belum ditemukan pembahasan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan pedagogik guru dalam penelitian ini. Walaupun kesamaan pada penelitian ini terletak pada Musyawarah Guru Mata Pelajaran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) itu sendiri.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah penelitian yang memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pokok masalah yang ada dalam penelitian.¹²

1. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) adalah salah satu kegiatan yang dianggap efektif dalam meningkatkan profesionalisme guru melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), kegiatan ini berasal dari satu rumpun bidang studi ini dilakukan untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang studi tersebut, oleh karena itu MGMP merupakan salah satu sistem penataran guru dengan pola dari, oleh dan untuk guru.¹³

Menurut Depdiknas, mengungkapkan bahwa Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) adalah wadah kegiatan profesional bagi para guru mata pelajaran yang sama pada jenjang SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA.SMALB, dan

¹² Arikunto, S, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 53

¹³ Jurnal Tarbiyah, *Op.Cit*, hlm. 293

SMK/MAK di tingkat kabupaten/kota yang terdiri dari sejumlah guru dari sejumlah sekolah.¹⁴

Menurut sutrisno mengungkapkan bahwa Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) adalah suatu wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di suatu sanggar, kabupaten atau kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar, dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi/pelaku perubahan reorientasi pembelajaran di kelas. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pengembangan sumber daya manusia.

Jadi dapat ditarik kesimpulan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI adalah wadah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada pada perangkat pembelajaran proses dengan tujuan meningkatkan profesionalisme guru dalam mengajar sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan.

Sebuah organisasi tidak lepas dari suatu dasar dan tujuan. Yang mendasari kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, bahwa setiap tenaga kependidikan berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan suatu bangsa.
- b. Peraturan pemerintah No.38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan, bab XIII pasal 61 ayat 1 tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan

¹⁴ Soetjipto, *Profesi Keguruan.*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 13

¹⁵ Pendidikan Nasional, *Rambu-rambu pengembangan kegiatan KKG dan MGMP*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Pendidikan, 2009), hlm. 9

profesi sebagai wadah untuk meningkatkan atau mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat dan kesejateraan tenaga kependidikan demi tercapainya tujuan pendidikan secara optimal.

- c. Undang Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 tentang guru.
- f. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Program Sarjana (S1) kependidikan bagi guru dalam jabatan.

Adapun yang menjadi tujuan dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI ini antara lain:

- a. Memotivasi guru untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan dan membuat evaluasi program kegiatan pembelajaran dalam rangka meningkatkan keyakinan diri sebagai guru profesional.

- b. Membantu guru untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber (baik dari workshop, pertemuan rutin, seminar, pelatihan dan lain-lain).
- c. Membantu guru memecahkan masalah-masalah yang terkait dengan kegiatan-kegiatan proses pembelajaran dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
- d. Memotivasi guru khususnya dalam merumuskan dan menetapkan orientasi peningkatan pembelajaran di masing-masing lembaga atau unit kerjanya.
- e. Mengembangkan pembelajaran yang inovatif, kreatif dan menyenangkan.
- f. Mengembangkan kerja sama antara Guru Pendidikan Agama Islam, masyarakat, dan pemerintah dalam pembinaan agama di lingkungan sekitar tempat tinggalnya.

2. Kerangka Dasar dan Struktur Program Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

Berdasarkan rambu-rambu pelaksanaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang disusun oleh kementerian Pendidikan Nasional, kerangka dasar program kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) merujuk kepada pencapaian empat kompetensi guru yaitu kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian.

Struktur program kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) terdiri dari program umum, program inti atau pokok dan program penunjang dengan uraian sebagai berikut:

- a. Program Umum adalah program yang bertujuan untuk memberikan wawasan kepada guru tentang kebijakan-kebijakan pendidikan di tingkat daerah sampai pusat, seperti kebijakan terkait dengan pengembangan profesionalisme guru.
- b. Program inti adalah program-program utama yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kompetensi dan profesionalisme guru. Program inti dapat dikelompokkan kedalam program rutin dan program pengembangan.
 - 1). Program rutin terdiri dari:
 - a) Diskusi permasalahan pembelajaran.
 - b) Penyusunan dan pengembangan silabus, program semester, dan rencana program pembelajaran.
 - c) Analisis kurikulum
 - d) Penyusunan laporan hasil belajar siswa
 - e) Pendalaman materi
 - f) Pelatihan terkait dengan penguasaan materi yang mendukung tugas mengajar.
 - 2). Program pengembangan dapat dipilih sekurang-kurangnya lima dari kegiatan-kegiatan berikut:
 - a) Penelitian, diantaranya penelitian tindakan kelas.
 - b) Penulisan karya ilmiah.
 - c) Seminar, lokakarya, kolokium (paparan hasil penelitian), dan diskusi panel.
 - d) Pendidikan dan pelatihan (diktat terjenjang).

- e) Penerbitan jurnal dan buletin Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
 - f) Penyusunan dan pengembangan website Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
 - g) Kompetensi Kinerja Guru
 - h) Pendampingan pelaksanaan tugas guru oleh pembimbing atau tutor atau instruktur atau fasilitator di Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
 - i) *Lesson Study* (suatu pengkajian praktik pembelajaran yang memiliki tiga komponen yaitu *plan, do, see* yang dalam pelaksanaannya harus terjadi kolaborasi antara pakar, guru pelaksana, dan guru mitra).
 - j) *Profesional Learning Community* (komunitas belajar profesional)
 - k) TIPD (*Teachers International Profesional Development*)
 - l) Global Gateway
- c. Program Penunjang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dengan materi-materi yang bersifat penunjang seperti bahasa asing, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan lain-lain.

3. Kompetensi Pedagogik Guru

Di dalam Standar Nasional Pendidikan dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Menurut Undang-undang Guru dan Dosen, Guru profesional harus memiliki empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan pribadi. Oleh karena itu, selain terampil mengajar, seorang guru juga memiliki pengetahuan yang luas, bijak dan dapat bersosialisasi dengan baik. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, maka guru harus:¹⁶

- a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme.
- b. Memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Mematuhi kode etik profesi.
- e. Memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas.
- f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerjanya.
- g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesinya secara berkelanjutan.
- h. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalnya, dan
- i. Memiliki organisasi profesi yang berbadan hukum.

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam mengelola pembelajaran peserta didik, yang meliputi: a) pemahaman peserta didik, b) perancang dan pelaksanaan pembelajaran, c) evaluasi pembelajaran dan, d) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang

¹⁶ *Undang-undang guru dan dosen*, (Bandung: Fokus Media, 2011), hlm. 4

dimilikinya. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik. Selain itu kemampuan pedagogik juga ditunjukkan dalam membantu, membimbing dan memimpin peserta didik.¹⁷

Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi khas yang membedakan guru dengan profesi lainnya, menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didik.

Jadi dapat disimpulkan kompetensi pedagogik guru adalah kompetensi kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini secara keseluruhan terdiri dari lima bab. Masing-masing bab akan memuat pokok bahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan secara umum keseluruhan isi tesis yaitu: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori.

Bab II Landasan Teori Konsep Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kompetensi Pedagogik Guru. Dalam bab ini dikemukakan konsep atau teori yang berkenaan dengan: Pengertian Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Rincian Program Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

¹⁷ Wahyudi, I, *Panduan Lengkap Uji Sertifikasi Guru*, (Jakarta: PT Prestasi Pustaka Karya, 2012), hlm. 22

Kemudian teori yang berhubungan dengan kompetensi pedagogik guru, meliputi: Guru dan Kompetensi Guru, Kompetensi Pedagogik Guru, Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi pedagogik.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang metode penelitian berisi tentang jenis penelitian, objek penelitian, tehnik dan intrumen penelitian sebagai alat untuk mendapatkan informasi, teknik dan pengolahan dan analisis data sebagai akhir kegiatan untuk mendapatkan hasil kesimpulan dari penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kontribusinya dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru. Dalam bab ini memuat: Kegiatan-kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI, memuat tentang kompetensi pedagogik guru dan memuat tentang peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru.

Bab V Penutup. Dalam bab penutup ini akan dikemukakan: Kesimpulan, dan Saran-Saran.